



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFRI AMRUL
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 64870

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.144.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/245 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
5. Tanah Seluas 1715 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1750 m2/20 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 384.800.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 614.182.963



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 3.172.482.963

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 3.172.482.963

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.